

PERHUBUNGAN – TRANSPORTASI

2023

PERBUP BOGOR NO.6, BD 2023/NO.6, 23 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - bahwa dengan adanya dinamika pembangunan dan kebijakan pengembangan sistem transportasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022, UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No.34 Tahun 2006, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.13 Tahun 2017, PP No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.30 Tahun 2021, diubah dengan dengan PP No.13 Tahun 2017, PP No.55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.30 Tahun 2021, PP No.79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.30 Tahun 2021, PP No.74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.30 Tahun 2021, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.37 Tahun 2017, PP No.13 Tahun 2019, PP No.5 Tahun 2021, PP No.6 Tahun 2021, PP No.7 Tahun 2021, PP No.16 Tahun 2021, PP No.21 Tahun 2021, PP No.30 Tahun 2021, PERPRES No.38 Tahun 2015, PERPRES No.55 Tahun 2018, PERPRES No.10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.49 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No.5 Tahun 2007, PERDA Kab. Bogor No.6 Tahun 2012, PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No.4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2021, PERBUP Bogor No.110 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Strategi dan program penyelenggaraan transportasi Kabupaten Bogor ada 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi, yang meliputi: peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan; pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan; pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan; pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel; pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi; peningkatan kinerja lalu lintas; pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan; pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. Pelaksanaan RIT Kabupaten Bogor dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024; Tahap II Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan RIT Kabupaten Bogor, disusun rencana aksi yang paling sedikit memuat: waktu pelaksanaan; pendanaan; dan mekanisme penyelenggaraan. Penyusunan rencana aksi berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan mengacu pada RIT Jabodetabek. Mekanisme penyelenggaraan RIT Kabupaten Bogor, meliputi: penyusunan rencana aksi untuk menyelaraskan rencana program dan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan; proses tahapan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan, waktu pelaksanaan dan pendanaan yang tertuang

dalam rencana aksi rencana induk transportasi Kabupaten Bogor; evaluasi setiap tahapan kegiatan rencana induk transportasi Kabupaten Bogor. Dinas melakukan evaluasi terhadap RIT Kabupaten Bogor. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam penyelenggaraan transportasi Jabodetabek dilakukan koordinasi melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023.
  - Penjelasan: 34 hlm.